

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PDKTSAM REBORN

Ike Zhiana Huzaini¹, Ratna Dwi Susanti², Hayat³

Email: ikezhianahuzaini29@gmail.com¹, ratnadwisusanti386@gmail.com²,
hayat@unisma.ac.id³

Universitas Islam Malang

Abstrak: Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi pemangku penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk ikut serta dalam implementasi e-government guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan adanya aplikasi PDKTSAM Reborn sebagai bentuk langkah awal Pemerintah Kota Malang dalam menangani masalah kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas aplikasi PDKTSAM Reborn dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1985 : 53) yang terdiri dari tiga aspek yakni pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi. Dari teori pengukuran efektivitas tersebut hasil penelitian menyebutkan bahwa penggunaan aplikasi PDKTSAM Reborn masih perlu adanya beberapa perbaikan dan evaluasi. Mulai dari ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi yang masih belum optimal di beberapa wilayah Kota Malang. Namun, dengan adanya aplikasi PDKTSAM Reborn juga membantu dalam pelaksanaan intervensi program bantuan yang tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ada serta memberikan penilaian jangka panjang untuk program bantuan yang telah dilakukan sehingga lebih terorganisir dan sistematis.

Kata Kunci: Kemiskinan, Efektivitas, PDKTSAM Reborn

***Abstract:** Along with the development of technological advances and information, public service providers are required to participate in the implementation of e-government in order to realize effective, efficient and quality public services. This is in line with the PDKTSAM Reborn application as a form of the Malang City Government's first step in dealing with poverty issues. This study aims to determine the effectiveness of the PDKTSAM Reborn application by using the effectiveness measurement theory proposed by Richard M. Steers (1985: 53) which consists of three aspects, namely goal achievement, integrity, and adaptation. From the effectiveness measurement theory, the research results state that the use of the PDKTSAM Reborn application still needs some improvement and evaluation. Starting from the availability and competence of human resources and technological infrastructure that is still not optimal in several areas of Malang City. However, the PDKTSAM Reborn application also assists in the implementation of targeted assistance program interventions in accordance with existing criteria and provides long-term assessments for assistance programs that have been carried out so that they are more organized and systematic.*

Keywords: Poverty, Effectiveness, PDKTSAM Reborn

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 merupakan sebuah upaya dari Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebelum adanya peraturan tersebut, upaya penanganan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi akar permasalahan. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi peraturan tersebut juga membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk

mencapai hasil yang optimal dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan adanya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengatur teknis dan prosedur dalam implementasi pelayanan publik (e-government), yang mencakup pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia serta pengelolaan data dan informasi publik. Di mana electronic government menjadi bentuk respons untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta implementasi konsep kolaborasi dalam menangani masalah kemiskinan. Electronic government merupakan pemanfaatan teknologi dan komunikasi (TIK) yang digunakan oleh pemerintah selaku pemangku penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dari penerapan e-government adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dalam penerapannya, e-government melibatkan konsep interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Efektivitas merupakan salah satu unsur yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal ini dapat ditinjau dari perbandingan perencanaan organisasi dengan hasil lapangan yang terjadi. Jika suatu kebijakan tidak dapat berjalan sesuai rencana, maka dapat dikatakan bahwa sebuah organisasi belum mencapai efektivitas dalam mewujudkan tujuannya. Dalam pemerintahan, efektivitas merupakan suatu hal yang penting untuk direalisasikan, salah satunya dapat diterapkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dalam hal ini telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pendataan kesejahteraan sosial melalui aplikasi PDKTSAM Reborn.

Aplikasi PDKTSAM Reborn merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pendataan kesejahteraan sosial dalam mengentaskan kemiskinan yang lebih efektif dan terintegrasi. Hal ini merupakan bentuk langkah awal untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Malang. Aplikasi PDKTSAM Reborn sendiri telah dilengkapi oleh beberapa fitur yang belum ada sebelumnya, di antaranya adalah dilengkapi dengan sistem geospasial, monitoring dan evaluasi, serta integrasi data. Penggunaan aplikasi PDKTSAM Reborn dapat diartikan sebagai bentuk efektivitas dalam pemerintah mengintegrasikan data kemiskinan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan adanya data yang akurat ini dapat meningkatkan efektivitas program bantuan yang diberikan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Selain itu guna mendorong adanya kolaborasi antar instansi pemerintah untuk meningkatkan sinergi penanganan kemiskinan dan menciptakan sistem yang lebih holistik dalam pengelolaan data dan pelayanan publik.

Namun dari hasil penelitian melalui kajian pustak yang dilakukan ada beberapa tantangan dalam efektivitas pengentasan kemiskinan melalui aplikasi PDKTSAM Reborn. Pertama, diperlukannya sistem teknologi yang akurat dalam memberikan data informasi dikarenakan perbedaan infrastruktur teknologi di berbagai daerah sehingga menghambat akses masyarakat untuk menggunakan aplikasi yang menyebabkan kemungkinan tidak meratanya bantuan pemerintah yang diberikan. Kedua, minimnya sumber daya manusia yang disebabkan oleh perubahan budaya kerja menjadi berbasis sistem sehingga butuh jangka waktu yang panjang dalam beradaptasi.

Pengukuran efektivitas e-government dalam pengentasan kemiskinan ini harus diimbangi dengan teori yang sesuai. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori mengenai ukuran efektivitas dari Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers (1985 :

53) dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Organisasi” karena penulis menganggap teori ini relevan dengan penelitian yang dilakukan. Di mana Duncan mengatakan bahwa ada tiga indikasi dalam mengukur efektivitas yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau literature review, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah berbagai sumber, mulai dari buku, jurnal dan berbagai naskah terbitan yang sesuai dengan topik penelitian untuk menghasilkan sebuah topik atau isu tertentu. Pada penelitian ini kata kunci yang digunakan dalam pencarian sumber data adalah “Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pendataan Kesejahteraan Sosial”.

Literature review dapat berasal dari beberapa macam sumber jurnal nasional maupun internasional menggunakan tiga database di antaranya BASE, Science, Direct, Nelth dan textbook atau handbook yang berkaitan dengan hasil penelitian efektivitas penerapan e-government dalam pendataan kesejahteraan sosial.

Lokasi atau tempat yang penulis pilih adalah Kota Malang tepatnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Kota Malang merupakan salah satu daerah yang telah merealisasikan penerapan e-government dalam pelayanan publik salah satunya dalam masalah kemiskinan. Terbukti dengan adanya Pengentasan Kemiskinan melalui PDKTSAM Reborn berhasil dalam lima belas tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Malang mengalami tren penurunan, dari yang semula 7,22% pada tahun 2008, menjadi 4,26% per-Maret 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan Aplikasi PDKTSAM Reborn

Aplikasi PDKTSAM Reborn diluncurkan pada 19 Juni 2024 sebagai bentuk pembaharuan dari aplikasi sebelumnya yang dilengkapi dengan beberapa fitur terbaru yakni berbasis data geospasial, monitoring dan evaluasi, serta adanya kolaborasi dalam penyusunan database. Selain itu pembaharuan ini merupakan bentuk respons Pemerintah Kota Malang dari evaluasi dalam pendataan kesejahteraan sosial yang di antaranya adalah:

1. DTKS belum menggambarkan warga miskin di Kota Malang;
2. Data P3KE perlu dilakukan validasi sesuai dengan amanah Inpres Nomor 4 Tahun 2022;
3. Angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS tidak dilengkapi data by name dan by address;
4. Kota Malang belum mempunyai data kemiskinan.

Selain itu dalam penyusunan database dilakukan melalui kolaborasi antar lembaga pemerintah yang terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda):
 - a) Menyusun indikator kesejahteraan sosial dan dituangkan pada Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/272/35.73.112/2022
 - b) Melakukan validasi DTKS dan P3KE di lima kecamatan (Kedungkandang, Sukun, Lowokwaru, Klojen, Blimbing)
2. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo):
 - a) Menyiapkan database kesejahteraan sosial

- b) Membuat aplikasi pendataan dalam pengisian kuesioner kesejahteraan sosial
3. Dinas Sosial (Dinsos) & P3AP2KB:
- a) Pemberian DTKS sebagai data dasar penentuan responden
 - b) Pendampingan proses validasi database kesejahteraan sosial melalui PUSKESOS masing-masing kelurahan
4. Disdikbud, Dispendukcapil, Diskopindag, Disnaker, PMPTSP, DPUPRPKP, Dinkes & Bagian Kesejahteraan Rakyat:
- a) Memberikan data dan informasi (program dan kegiatan) untuk mengidentifikasi (need) dalam rangka intervensi penanggulangan kemiskinan

Penambahan fitur berbasis data geospasial juga merupakan salah satu pembaharuan dari aplikasi PDKTSAM Reborn. Tujuan dari adanya data geospasial adalah untuk pengelolaan data berbasis lokasi sehingga membantu proses verifikasi secara langsung di lapangan, menghindari duplikasi penerima serta memastikan bahwa bantuan atau intervensi yang diberikan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ada. Selain itu data geospasial juga dapat diakses oleh berbagai Instansi Pemerintah sehingga mempermudah proses koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program sosial. Dengan adanya data geospasial juga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika kemiskinan di wilayah tertentu.

Selain itu aplikasi PDKTSAM Reborn juga mengenalkan fitur baru yang signifikan dalam monitoring dan evaluasi dalam penanganan kemiskinan. Pertama, fitur ini memberikan umpan balik terhadap efektivitas program yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap program penanganan kemiskinan yang dilakukan. Kedua, fitur ini memberikan data yang akurat dan relevan sehingga intervensi dalam penanganan kemiskinan bisa tepat sasaran. Ketiga, dalam jangka panjang fitur ini dapat memuat seluruh program penanganan kemiskinan sehingga monitoring dan evaluasi dapat lebih terorganisir dan sistematis.

Efektivitas Pengentasan Kemiskinan melalui PDKTSAM Reborn

Untuk dapat mengetahui Efektivitas Pengentasan Kemiskinan melalui Aplikasi PDKTSAM Reborn, peneliti menggunakan ukuran efektivitas dari Richard M. Steers (1985 : 53) yang terdiri dari:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan seluruh upaya dan proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yang dalam hal ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan melalui aplikasi PDKTSAM Reborn di Kota Malang. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor penghalang dalam berjalannya efektivitas penerapan e-government untuk menangani masalah kemiskinan, salah satunya ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia.

Ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting dalam mendukung capaian atau tujuan suatu organisasi. Di era perkembangan teknologi, kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sangat diperlukan dalam hal mengelola dengan baik dan konsistensi. Menurut John P. (2015) lemahnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif yang mengakibatkan pelaksanaan suatu kebijakan tidak berjalan semestinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia, mengatur tentang manajemen

sumber daya manusia di sektor publik termasuk rekrutmen, pengembangan, dan penilaian kinerja ASN. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan sebuah elemen yang sifatnya penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dengan perencanaan yang matang dan pengembangan sumber daya manusia sebuah organisasi atau instansi pemerintah dapat mengidentifikasi hal apa saja yang dibutuhkan dan memberikan program pelatihan yang sesuai danantisipasi kekurangan pegawai.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Richard M. Steers bahwa ukuran pencapaian tujuan efektivitas merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aspek yang harus terpenuhi yakni kurun waktu dan target konkret. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa temuan yang ada efektivitas dalam pencapaian tujuan Pengentasan Kemiskinan melalui Aplikasi PDKTSAM Kota Malang masih belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang menjadi penghambat proses efektivitas dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukannya pengembangan yang fokus untuk meningkatkan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam menggunakan dan menyesuaikan budaya kerja berbasis teknologi serta target yang konkret.

2. Integrasi

Integrasi menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat kapabilitas suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan organisasi lainnya. Tujuan dari adanya sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada subyek sosialisasi agar dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang ada. Sosialisasi menduduki peran utama untuk memberikan kontribusi dalam proses meningkatkan kinerja serta pelayanan informasi terkait proses pengelolaan data antar instansi pemerintah.

Richard M. Steers mengatakan bahwa dalam tahap integrasi diartikan sebagai pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi guna pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah dalam pengelolaan dan pengoperasian data aplikasi PDKTSA Reborn. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yakni prosedur dan proses sosialisasi.

Oleh karena itu dapat kita simpulkan dengan aspek integrasi dengan data temuan yang ada bahwa tahap prosedur dapat dikatakan cukup efektif karena dalam kolaborasi pengelolaan PDKTSAM Reborn mulai dari pembuatan aplikasi dan pengelolaan database seluruh elemen yang ada antar instansi pemerintah paham dan mengetahui seluruh alur penginputan. Sedangkan terkait sosialisasi atau koordinasi antar sektor wilayah yang ada di Kota Malang dirasa belum maksimal dikarenakan perbedaan infrastruktur teknologi yang ada sehingga proses penginputan data memerlukan waktu serta validasi data yang berulang-ulang

3. Adaptasi

Adaptasi didefinisikan sebagai bentuk strategi penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Seperti pengembangan kemampuan dan penyesuaian terhadap perkembangan sarana prasarana yang tersedia. Bentuk adaptasi dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi dua macam, yakni adaptasi masyarakat dan adaptasi sektor pemerintah publik selaku pemangku penyelenggara pelayanan publik.

Pada adaptasi masyarakat, masyarakat dihadapkan dengan pelayanan berbasis online untuk menginput data kesejahteraan sosial, mulai dari tempat tinggal,

pendapatan, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini memberikan dampak efektif dan efisien dalam pendataan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sedangkan pada adaptasi sektor pemerintah publik dihadapkan dengan tantangan adaptasi budaya kerja yang sebelumnya menggunakan konsep manual beralih pada berbasis teknologi. Sehingga dibutuhkan pelaksanaan pengembangan sesuai kompetensi dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pengoperasian aplikasi PDKTSA Reborn. Selain itu kurangnya ketersediaan sumber daya manusia juga dihambat oleh infrastruktur teknologi di beberapa wilayah Kota Malang yang masih belum optimal, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Malang untuk dapat menyesuaikan kebutuhan baik sumber daya manusia maupun infrastruktur yang dibutuhkan guna terlaksananya pelayanan dan program pendataan kesejahteraan sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Malang melalui Aplikasi PDKTSAM Reborn yang lebih terintegrasi dan optimal.

KESIMPULAN

Aplikasi PDKTSAM Reborn merupakan sistem yang digunakan Pemerintah Kota Malang untuk melakukan pendataan kesejahteraan sosial guna mengentaskan kemiskinan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PDKTSAM Reborn pada Pemerintah Kota Malang memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat menengah kebawah. Implementasinya memberikan manfaat yang berpengaruh banyak untuk masyarakat miskin, hal ini dapat dilihat dari peningkatan aplikasi dan adanya fitur baru. Aplikasi ini menggunakan fitur seperti sistem geospasial, pemantauan dan evaluasi, dan integrasi data yang memungkinkan meminimalisir kesalahan target atau data double. Aplikasi tersebut bertujuan untuk menyediakan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, meningkatkan efektivitas program bantuan dan mendorong kolaborasi antar lembaga pemerintah. Namun tantangannya antara lain perbedaan infrastruktur teknologi dan kurangnya sumber daya manusia akibat budaya kerja berbasis sistem.

Penelitian ini menggunakan teori Richard M. Steers (1985 ; 53) untuk mengukur efektivitas e-Government dalam pengentasan kemiskinan, dengan fokus pada pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kajian dilakukan di Kota Malang tepatnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyansah, D. (2022). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Dinas Sosial DKI Jakarta. (2024, Oktober 12). Dorong Akuntabilitas, Dinsos DKI Inisiasi Pengintegrasian dan Pemanfaatan DKTS Berbasis Geospasial Pada Portal Jakarta Satu. Retrieved from dinsos.jakarta.go.id: <https://dinsos.jakarta.go.id/berita/dorong-akuntabilitas-dinsos-dki-inisiasi-pengintegrasian-dan-pemanfaatan-dtks-berbasis-geospasial-pada-portal-jakarta-satu>
- Husri, H., Usman, D., & Mone, A. (2021). Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial Next Generation Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(6), 1923-1935.
- Khaerunisa, K., & Purnamasari, H. (2024). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL STUDI:

WEBSITE SINYAMAN DINSOSKU. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3201-3206.

Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis pentingnya digitalisasi & infrastruktur teknologi informasi dalam institusi pemerintahan: E-Government. *Jurnal Fasilkom*, 12(1), 14-19.

Resdiana, E., & Puspaningrum, I. I. (2020). Efektifitas dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep. *Public Corner*, 15(1), 48-60.